Implementasi Kebijakan Permodalan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Khususnya Pasal 44 Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu

Samsudin¹, Fahrul Mauzu²

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Dompu
e-mail: daesamsoro@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Kebijakan Permodalan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Khususnya Pasal 44 Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Permodalan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Khususnya Pasal 44 Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan logika induktif abstraktif, dimana dalam penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis aktraktif dari Miles dan Huberman. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik pemeriksaan menggunakan derajat: standar kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian ini meliputi : (1) Khususnya Koperasi Serba usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu belum sepenuhnya melaksanakan regulasi yang ada. (2) Pihak pemerintah, melalui lembaga atau instansi yang menaungi kegiatan perkoperasian tersebut kurang melakukan pengawasan terhadap kinerja berbagai lembaga koperasi yang ada. Dengan demikian implementasi kebijakan murni menjadi ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pihak manajemen koperasi tersebut, (3) Pihak manajemen, melegalkan berbagai ketentuan yang menurut kami tidak sesuai dengan filosofi berkoperasi melalui rapat anggota. Sehingga hanya anggota yang mengikuti rapat saja yang mengetahui hal tersebut walaupun berdasarkan pengamatan kami mereka yang hadirpun kurang memahami hal tersebut, (4) Hal-hal yang menghambat implementasi kebijakan permodalan pada Koperasi Serba usaha (KSU) Bangkit Jaya antara lain: (1) Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara berkoperasi sehingga enggan bergabung menjadi anggota kopersi, (2) Adanya anggapan bahwa anggota koperasi hanya diikuti oleh masyarakat kelas bawah, (3) Adanya anggapan bahwa menyimpan dana pada koperasi tidak memberikan keuntungan yang besar.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Permodalan Koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

Abstract

The problem in this research is how to implement the Cooperative Capital Policy Based on Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Specifically Article 44 in the Bangkit Jaya Multipurpose Cooperative (KSU), Dompu Regency. The purpose of this research is to determine the implementation of cooperative capital policies based on Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, especially Article 44 in the Bangkit Jaya Multi-purpose Cooperative (KSU), Dompu Regency. The type of research is

descriptive qualitative with abstractive inductive logic, where the determination of informants uses snowball sampling techniques. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis uses attractive analysis from Miles and Huberman. To test the validity of the data using examination techniques using degrees: standards of trust, transferability, dependence and certainty. The results of this research include: (1) In particular, the Bangkit Jaya Multi-business Cooperative (KSU) Dompu Regency has not fully implemented existing regulations. (2) The government, through the institutions or agencies that oversee cooperative activities, does not supervise the performance of various existing cooperative institutions. In this way, the implementation of pure policy becomes a provision made unilaterally by the management of the cooperative. (3) The management legalizes various provisions which in our opinion are not in accordance with the cooperative philosophy through member meetings. So that only members who attended the meeting knew about this, although based on our observations those who attended did not understand this, (4) Things that hamper the implementation of capital policies at the Bangkit Jaya Multi-purpose Cooperative (KSU) include: (1) Still Many people do not understand how to cooperate so they are reluctant to join as members of a cooperative, (2) There is an opinion that members of a cooperative are only joined by lower class people, (3) There is an opinion that saving funds in a cooperative does not provide big profits.

Keywords: *Policy Implementation, Cooperative Capital and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, khususnya pasal 44 yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Salah satu sektor perekonomian Negara yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah Koperasi, karena Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang paling cocok diterapkan berdasarkan amanat pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "perekonomian disusun sebagai usaha bersama derdasar atas asas kekeluargaan" (Dirjen Dikti, Depdikbud, Tahun 1986, hal. 6).

Bunyi pasal tersebut mencerminkan adanya dasar demokrasi dalam perekonomian Indonesia, oleh sebab itu perlu dikembangkan kehidupan demokrasi dalam perekonomian Negara melalui Koperasi. Dengan memperhatikan koperasi seperti tersebut diatas maka sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian tepat, pertumbuhan ekonomi koperasi belum sepenuhnya merupakan wujud dan perannya sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945, demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya memegang hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu untuk melaraskan pembangunan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan baru yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar benar-benar menerapkan prinsip dan kaedah ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.

Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan rakyat.

Selanjutnya dalam undang-undang perkoperasian ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, mengarah pada perubahan agar dasar dan pembinaan koperasi merupakan dari wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, demikian juga pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan pada koperasi, selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu yang telah berhasil yang telah diusahakan koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerintah dalam kesempatan berusaha.

Dalam perundang-undangan perkoperasian ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan, penyerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun bukan anggota. Dengan kemungkinan sangatlah penting bagi koperasi mendapat dukungan dan patisipasi dari anggota, untuk keperluan pihak manajemen memerlukan berbagai konfirmasi yang berasal dari anggota, khususnya informasi tentang kebutuhan dan kepentingan anggota. Informasi ini hanya mungkin diperlukan jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik.

Pada koperasi, anggota inilah yang menjadi titik awal yang menentukan proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Sebagai pemilik, anggota koperasi menginginkan koperasi sebagai sumber yang mampu melampaui kepentingannya melalui usaha-usaha yang efisien dan efektif. Untuk menunjang harapan tersebut anggota memberikan informasi kontribusi permodalan menentukan program-program yang harus dilaksanakan pihak manajemen dan mengawasi jalannya koperasi untuk menunjang hal tersebut diatas peran serta dari anggota dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian sangat diperlukan, karena itu faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan atau perkembangan suatu organisasi koperasi adalah modal.

Dalam koperasi, masyarakat dapat menuangkan segala aspirasinya untuk kepentingan mengatasi kesulitan ekonominya, sebab koperasi berjalan dari, untuk, dan oleh anggota koperasi itu sendiri. Dengan demikian koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa harus mampu dikembangkan demi menumbuhkan demokrasi ekonomi rakyat serta dalam upaya meningkatkan volume usahanya yang mengacu pula pada peningkatan proses pelaksanaan permodalan.

Untuk dapat mengembangkan usaha koperasi tersebut, maka salah satu komponen yang sangat diperlukan adalah masalah modal. Modal dalam hal ini merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan atau kegiatan perkoperasian, karena tanpa modal kegiatan perkoperasian dalam bentuk apapun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian halnya bagi suatu koperasi dimana modal usaha merupakan hal yang sangat penting karena kelangsungan hidup suatu koperasi sangat tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi tersebut.

Walaupun diketahui bahwa koperasi bukan bentuk dari kumpulan modal, tetapi lebih mementingkan pada kumpulan orang-orang yang pada umumnya berpenghasilan rendah atau perekonomian lemah sehingga modal yang dikumpulkan pada koperasi relatif kecil, untuk itu koperasi merasa mengalami kesulitan didalam mengembangkan usahanya, sekaligus sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh relatif kecil pula. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN)

maupun pihak swasta agar memberikan bantuan permodalan kepada koperasi sehingga koperasi yang bersangkutan mampu meningkatkan volume usahanya dan sekaligus akan mampu meningkatkan perolehan hasil usaha. Namun kenyataan dilapangan dijumpai ada sebagian koperasi yang telah memperoleh bantuan permodalan namun tidak mampu meningkatkan usahanya sehingga sisa hasil usaha yang diperolehnya relatif kecil dan tidak mampu di tingkatkan.

Usaha simpan pinjam adalah usaha melayani para anggota/masyarakat untuk menabung/menyimpan dan memberikan pinjaman dalam bentuk kredit pada anggota/masyarakat yang membutuhkan dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan pada rapat anggota/masyarakat.

Dalam pengertian lain usaha simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya/masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal itu tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dalam menjalankan kegiatannya .

Menurut UU No. 17 tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pengertian Koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasakan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Salah satu hubungan penting koperasi dengan anggotanya yang berkedudukan sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi adalah dana (simpanan-simpanan) yang dijadikan modal usaha yang diserahkan pada koperasi, menjadi pertanyaan terkait memberikan dampak yang menguntungkan atau merugikan.

Secara umum, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan- badan hukum koperasi yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi serba usaha (KSU) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membentu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat di kategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal itu tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dalam menjalankan kegiatannya. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkannya.

Melalui usaha simpan pinjam, anggota dapat memperoleh pinjaman lunak dengan jumlah pinjaman kecil hingga besar tanpa harus memberikan jaminan. Untuk

memberdayakan koperasi simpan pinjam, sejak tahun 2007 pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalankan program pemeringkatan koperasi. "Program ini bertujuan menilai kinerja koperasi secara kualitatif dan kuantitatif,".

Dengan program pemeringkatan, koperasi-koperasi akan mendapatkan pelatihan ketrampilan manajemen dan ketrampilan teknis berkoperasi dari lembaga independen, yaitu Surveyor Indonesia.

Koperasi serba usaha (KSU) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan komsumtif maupun untuk modal kerja kepada setiap peminjam, melalui unit usaha simpan pinjam dan menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari sejumlah uang pinjaman.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang merupakan hal emosional, latar belakang alami (*natural setting*), terhadap situasi sosial (Sugiyono, 2013:12). Adapun sumber data yaitu data primer dan data sekunder tentang pelaksanaan permodalan koperasi atau yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui, (1) Observasi, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan, baik secara berhadapan langsung maupun secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab; (2) Wawancara, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian; (3) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca beberapa buku, literature-literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun catatan penting tentang implementasi kebijakan permodalan Koperasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif di lakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Agar penelitian ini sesuai dengan tujuannya, di harapkan muncul implikasi teoritik berupa proposisi-proposisi sebagai hasil analisis data lapangan dan selanjutnya akan berguna pengayaan teori formal, maka penelitian ini menggunakan teknis analisis data yg dikembangkan oleh Milles dan Huberman (1992:15-20), dilakukan secara interaktif melalui tiga prosedur yaitu : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*verificasion*). Berikut rincian analisis data pada penelitian ini,

a) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan data tranformasi data "kasar" yg muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan data yg di peroleh di lapangan kemudian di reduksi oleh peneliti dengan cara: pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo dan selanjutnya di lakukan pilihan terhadap data yg diperoleh di lapangan, kemudian dari data itu mana yg relevan dengan permasalahan dan focus penelitian. Reproduksi data/proses transfomasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

b) Penyajian data (*data display*)

Penyajian data di maksudkan sebagai sekumpulan infomasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, maka segala apa yang sedang terjadi dan apa yg harus di lakukan dapat di fahami. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat di cari kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dapat di lakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik dan bagian (chart) atau bentuk teks naratif atau kumpulan kalimat, semuanya di rancang guna menyambungkan informasi yg tersusun dalam suatu bentuk yg padu dan mudah di raih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yg tepat.

c) Menarik kesimpulan (*verification*).

Penarik kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan "kesempatan intersubjektif" , dengan kata lain makna yg muncul dari data yang harus di uji kebenarannya, kokohnya dan cocoknya (validitasnya).

Verifikasi dalam penelian di lakukan secara kontinyu sepanjang penelitian verifikasi oleh peneliti di maksud untuk menganalisis dan menctat makna dari informasi yang di kumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesa dan di simpulkan secara interaktif, sehingga terbentuk proposisi tertentu yg bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Serba usaha (KSU) Bangkit Jaya Kabupaten Dompu memiliki bidang usaha yang telah dijalankan sejak pertama kali berdiri sampai saat sekarang adalah kegiatan usaha simpan pinjam bagi anggota koperasi. Koperasi Serba usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, di lihat dari jumlah dana serta asset yang dikelola sampai dengan saat ini telah berjumlah kurang lebih Rp. 1.302.675.550,- (*Satu milyar tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Komposisi asset Koperasi Serba Usaha (KSU) Dompu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Data Asset & Modal Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu s/d Tahun 2022

No	Uraian	Nilai
1.	Aktiva lancer	Rp. 1.293.030.800
2.	Aktiva tetap	Rp. 9.644.750
3.	Hutang Jangka pendek	Rp. 894.502.946
4.	Hutang jangka Panjang	Rp. –
5.	Kekayaan Bersih	Rp. 408.173.604

Sumber Data: Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, 2022

Berkaitan dengan permodalan, Manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, menyatakan bahwa terdapat 2 sumber atau dua macam permodalan. Modal tersebut terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib, sedangkan modal pinjaman terdiri atas simpanan sukarela dari anggota dan tabungan anggota..." (wawancara tanggal 4 Agustus 2022).

Dari komposisi modal tersebut, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, selanjutnya menyalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkannya, sesuai dengan kondisi dari anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu yang terdiri atas bermacam-macam berbagai latar belakang jenis mata pencaharian, maka dengan hal tersebut didominasi oleh para pedangang kecil dan pedagang menengah, dan sebagian besar modal tersebut telah dipergunakan sebagai tambahan modal usaha. Lebih lanjut lagi, masyarakat Dompu yang tidak berprofesi sebagai pedangan pun bisa menjadi anggota dan menerima pinjaman dana yang diperuntukkan sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat yang telah menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu telah merasakan manfaat adanya Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu melalui pinjaman-pinjaman yang mereka ajukan menyatakan sangat bersyukur atas keberadaan koperasi tersebut, seperti yang diutarakan oleh Ibu Aisyah (pedagang barang klontong) selaku anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, bahwa kegiatan usaha perekonomian yang telah dirintisnya tersebut sangat terbantu dengan pinjaman modal yang diterimanya.

Sebelum kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu dilaksanakan, terdapat bahwa kegiatan yang pertama kali dilaksanakan adalah rapat anggota yang membahas masalah permodalan, baik mengenai jangka waktu maupun jumlah modal yang harus disimpan pada koperasi. Sedangkan kegiatan selanjutnya yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan rapat anggota yaitu dengan cara mengarahkan anggota untuk dapat menyimpan iuran pokok dan iuran wajib sebagai "modal sendiri" koperasi. Selain itu selanjutnya, semua anggota diharapkan dapat menyimpan iuran sukarela dan menabung sebagai "dana pinjaman" koperasi dari anggotanya. Sebagai contoh, Ibu Rapia (Penjual Sayur) selaku anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, pada saat ia menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, Ibu Rapia diwajibkan menyetor simpanan pokok sebesar Rp. 50.000. Simpanan pokok tersebut dapat dibayarkan secara tunai dan atau secara angsur sampai mencapai sejumlah tersebut. Sedangkan simpanan wajib sebesar Rp. 60.000 merupakan simpanan yang pembayarannya juga disesuaikan dengan kemampuan Ibu Rapia tetapi nominal tersebut sudah diatur dan disepakati dalam rapat anggota. Selanjutnya Ibu Rapia juga menyetorkan uang sebesar Rp. 201.500 sebagai simpanan sukarela. Simpanan sukarela tersebut dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak ditentukan jumlah simpanannya oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, dan yang terakhir yang disetorkan oleh Ibu Rapia adalah tabungan sejumlah Rp. 105.000, tabungan tersebut merupakan pinjaman koperasi dari Ibu Rapia selaku anggota yang kemudian akan menjadi modal pinjaman koperasi dan selanjutnya akan disalurkan kembali kepada anggota-anggota lain yang membutuhkannya.

Faktor-faktor yang Mendorong dan menghambat Implementasi Kebijakan Permodalan Koperasi

Dalam implementasi kebijakan permodalan koperasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu, seringkali berhadapan dengan berbagai hal yang menjadi penghambat dan selain itu ada juga beberapa hal yang menjadi pendorong dari peningkatan jumlah modal koperasi. Yang menjadi penghambat dalam permodalan koperasi adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami cara berkoperasi sehingga enggan bergabung menjadi anggota koperasi, karena adanya anggapan bahwa anggota koperasi hanya diikuti oleh masyarakat kelas bawah, dan menyimpan dana pada koperasi tidak memberikan keuntungan yang besar.

Selain dari yang tersebut di atas, sangat minim hal-hal yang dapat mendorong adanya peningkatan permodalan koperasi antara lain: masyarakat menganggap mudah mendapatkan modal usaha berupa pinjaman dengan syarat yang sederhana, dengan keberadaan koperasi masyarakat disatu sisi memperoleh lapangan pekerjaan sebagai pengelola maupun karyawan koperasi itu sendiri, mekanisme pembayaran serta mekanisme koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mau menyertakan modalnya pada koperasi.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan permodalan koperasi di Kabupaten Dompu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, khususnya pasal 44 yang menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan

calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Jaya Dompu belum sepenuhnya melaksanakan regulasi yang ada. Ketidaksesuaian tersebut dalam mekanisme pengumpulan modal sendiri serta adanya modal pinjaman dari anggota yang berlabel sukarela namun menjadi sebuah kewajiban bagi para anggota, khususnya bagi mereka yang akan mengajukan permohonan pinjaman modal usaha. Pihak pemerintah, melalui lembaga atau instansi yang menaungi kegiatan perkoperasian tersebut kurang melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga koperasi tersebut. Dengan demikian implementasi kebijakan permodalan murni menjadi ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pihak manajemen koperasi. Hal-hal yang menghambat implementasi kebijakan permodalan pada koperasi antara lain: 1) masih banyak masyarakat yang belum memahami cara berkoperasi sehingga enggan bergabung menjadi anggota koperasi, adanya anggapan bahwa anggota koperasi hanya diikuti oleh masyarakat kelas bawah; adanya anggapan bahwa menyimpan dana pada koperasi tidak memberikan keuntungan besar, 2) masyarakat menganggap mudah mendapatkan modal usaha berupa pinjaman dengan syarat yang sederhana, dengan keberadaan koperasi masyarakat disatu sisi memperoleh lapangan pekerjaan sebagai pengelola maupun karyawan koperasi itu sendiri, mekanisme pembayaran serta mekanisme lainnya dari koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mau menyertakan modalnya pada koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Bumi Aksara*, Jakarta.
- H. Soeradji, 1985. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Dewan Koperasi Indonesia, Jakarta.
- Hasibuan, 1999. *Organisasi dan Motivasi Bumi Aksara*, Jakarta
- Hendar, 2002. *Ekonomi Koperasi*, FE. UI, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Julia Brannen, 2000. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif*. Pustaka Pelajar, Samarinda
- Kasiyanto, M.J., 2004. *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, PPSN, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan kebijakan)*, UPP AMP YPKN, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM Yogyakarta
- Miles, Hubberman, 1992, *Analisis data kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 1990. *Metodologi Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S., 1996. *Metod Penelitian naturalistik*, Parsito, Bandung.
- Panji, Anoraga, 2000. *Dinamika Koperasi*, Rhineka Cipta & Adhi Aksara, Jakarta.
- Salim, 1998. *Kinerja Manejer dan Bisnis Koperasi*, UIN, Malang Press.
- Santoso, TWB. (Trans) Parsons, Wayne, 2006. *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Edisi Ke-2, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Singaribuan, 1995. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Saidam, Gozali, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro)*, Djambatan, Jakarta.
- Siagian, SP., 1985. *Filsafat Administrasi*, CV H. Mas Agung, Jakarta.
- Tulus, M. Agus, 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Tik tik, Sartika, Sujoedono, 2000. *Ekonomi Skala kecil Menengah dan Koperasi. Ghalia Indonesia*, Jakarta,
- Tilaar, HAR, 1997 *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Wahab, Abdul, 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi